

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pembangunan

Menurut Siagian (1994), pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu negara atau pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Ginanjar Kartasasmita (1994), pembangunan yaitu sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Menurut Todaro, pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat, dimana dengan adanya kegiatan pembangunan khususnya Pertanian diharapkan terjadinya peningkatan pendapatan riil perkapita petani, baik jangka pendek, menengah dan panjang serta memperbaiki sistem kelembagaan. Lebih lanjut Todaro (2000), menyatakan bahwa pembangunan setidaknya memenuhi tiga komponen dasar yaitu :

1. Kecukupan (*sustainance*) memenuhi kebutuhan pokok
2. Meningkatkan rasa harga diri atau jatidiri (*self-esteem*)
3. Kebebasan (*freedom*) untuk memilih.

Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan di Indonesia dewasa ini telah menganut sistem desentralisasi. Dasar desentralisasi pembangunan perikanan adalah UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti 14 UU No. 22/1999. Pada pasal 18 ayat 1 dinyatakan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut, diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya laut di wilayah laut. Sedangkan kewenangan daerah dalam pengelolaan sumberdaya

laut dijelaskan pada ayat 3 (tiga) meliputi: 1) Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; 2) Pengaturan administratif; 3) Pengaturan tata ruang; 4) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat; 5) Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; 6) Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Selanjutnya menurut Sondita (2001) pengembangan dalam hal pembangunan ekonomi dampaknya dapat dilihat pada: 1) Industri perikanan tangkap; 2) Perikanan rakyat; 3) Wisata massal dan ekowisata serta wisata bahari; 4) Perikanan budidaya; 5) Perhubungan laut dan pembangunan pelabuhan; 6) Pertambangan lepas pantai; 7) Penelitian kelautan; 8) Akses terhadap sumberdaya genetik.

Pembangunan yang komprehensif menurut *Asian Development Bank* (ADB) dalam Nikijuluw (1995) adalah pembangunan dengan memiliki ciri-ciri (1) berbasis lokal; (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3) berbasis kemitraan; (4) secara holistik; dan (5) berkelanjutan. Pengelolaan berbasis masyarakat setempat atau biasa disebut *Community-Based Management* (CBM). Pemanfaatan secara lestari hanya akan dicapai jika sumberdaya dikelola secara baik, proporsional dan transparan. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, alam, buatan dan sosial (Keraf, 2000).

2. Pembangunan Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,

produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Konsep pembangunan sector industry perikanan oleh Ditjen Perikanan Tangkap, (2005) meliputi a) Perikanan hulu, b) Usaha penangkapan, c) Perikanan hilir dan d) Jasa penunjang. Industri perikanan dipengaruhi oleh: bahan baku, tenaga kerja, lingkungan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan hasil perikanan, hingga pemasaran hasil industry perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memetakan setidaknya ada tujuh faktor kunci penentu keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan (Sutardjo, 2012). Ketujuh faktor tersebut adalah:

1. Kestinambungan ketersediaan sumber daya ikan.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana (Infrastruktur) yang memadai.
3. Pengembangan (inovasi) dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan secara massif dan efektif. Penerapan teknologi ini sekaligus untuk memberi nilai tambah sehingga masyarakat kelautan dan perikanan bisa semakin sejahtera dan meningkat skala ekonominya
4. Sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan yang handal dan kompeten.
5. Pasar yang dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik.
6. Dukungan investasi dari para pelaku usaha.
7. Regulasi pemerintah yang kondusif untuk mendukung pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

Pemerintah Indonesia memiliki visi untuk mengukuhkan diri sebagai pengeksport perikanan di dunia pada 2015, utamanya dalam perikanan tangkap

dan perikanan budidaya. Namun untuk mencapai visi tersebut terdapat berbagai permasalahan diantaranya:

1. Terbatasnya area penangkapan karena wilayah penangkapan hampir seluruhnya telah mengalami *over fishing*.
2. Terbatasnya teknologi reproduksi, kehadiran penyakit, keterbatasan bibit unggul serta ketersediaan pakan.
3. Terkait masalah sesioekonomi, nelayan umumnya memiliki sumberdaya manusia yang rendah.
4. Terbatasnya akses terhadap modal/capital bagi nelayan. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan, dengan adanya modal kerja maka usaha agroindustri rumahan di pedesaan dapat berkembang dengan baik. Ribuan atau bahkan jutaan usaha agrobisnis akan dapat berkembang dan menyerap banyak tenaga kerja manakala tersedia modal yang mudah diakses disertai sedikit pelatihan manajemen.
5. Naiknya harga sarana dan prasarana produksi perikanan sehingga meningkatkan biaya operasional melaut. Kenaikan harga BBM (solar) mengakibatkan sebagian besar nelayan mengeluhkan mahalnya operasional melaut, bahkan banyak nelayan yang berhenti melaut karena tidak mampu lagi membiayai operasional ke laut.

Menurut A. Nontji (2005), dalam upaya pengembangan perikanan laut ditemui berbagai kendala antara lain :

1. Kondisi geografis

Perairan Indonesia yang luas dan terletak pada posisi silang antara dua samudera, yaitu samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan antara dua benua yaitu Benua Australia dan Asia merupakan wilayah yang rawan dalam segi HANKAMNAS dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Kondisi geografi dengan banyak pulau bertebaran diseluruh perairan Indonesia membutuhkan sarana perhubungan laut. Perhubungan laut ini diperlukan untuk mendukung perkembangan ekonomi, sehingga memegang peranan yang sangat penting yang hingga kini dirasakan masih merupakan kendala tersendiri.

2. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan merupakan salah satu faktor rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi (khususnya untuk daerah Indonesia bagian Timur). Pengembangan infrastruktur secara lengkap akan memacu perkembangan pembangunan kelautan yang merupakan salah satu pintu keberhasilan pembangunan. Keterbatasan peralatan dan sarana fisik kelautan mengurangi keefektifan kegiatan eksplorasi dan penelitian kelautan.

3. Aktualisasi pemanfaatan tidak merata dan tidak seimbang

Kegiatan penangkapan ikan di laut sebagian besar masih berkisar di perairan pantai yang padat penduduknya. Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya perikanan laut belum merata untuk wilayah Indonesia. Khusus untuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masih sangat sedikit diusahakan,

sehingga memancing timbulnya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

4. Komitmen Pemerintah

Komitmen dan kelancaran dukungan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terhadap suatu pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan.

5. Kualitas Sumberdaya Manusia

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat laut diakibatkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM). Dampak yang ditimbulkan terungkap pada akses masyarakat terhadap sumberdaya laut dan penguasaan teknologi kelautan yang masih rendah.

6. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Peran IPTEK dalam usaha memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan secara efisien dan berkelanjutan sangat jauh tertinggal. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia serta keberadaan sumberdaya alam, baik di laut, di dasar laut mengharuskan kita memanfaatkan keunggulan IPTEK. Sistem pemantau maupun pemetaan sumberdaya alam di laut tidak dapat lagi menggunakan teknologi konvensional.

3. Konsep Basis Ekonomi dan Kontribusi Sektor

Teori Basis ekonomi berdasarkan pandangan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Hanya kegiatan basislah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Tarigan, 2005) teori basis ini mempunyai beberapa kelebihan yaitu

sederhana, mudah diterapkan, dapat dan dapat diterapkan, dapat dijelaskan struktur perekonomian suatu daerah dan dapat memberikan peramalan jangka pendek pertumbuhan suatu wilayah (Glasson, 1990).

Sjafrizal (2008) menyatakan bahwa perbedaan sector basis dan non basis ialah sector basis merupakan sector yang kegiatannya dapat mendatangkan pendapatan dari luar wilayah, sector yang fungsi permintaan bersifat *Exogenous* dan sector yang meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah serta sector yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan Kompetitif (*Competitif Advantage*) yang cukup tinggi, sedangkan non basis merupakan sector selain sector basis yang kurang potensial, tetapi berfungsi sebagai penunjang sector basis atau disebut juga *Service Basis* atau *Service Industries*. Sektor non basis kegiatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan local serta dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat setempat.

Sektor basis terdiri dari usaha-usaha local yang aktivitasnya tergantung pada factor-faktor eksternal. Kehidupan usaha sector ini banyak tergantung dari usaha-usaha non local. Perikanan misalnya dapat di kategorikan sebagai sector basis karena sebagian besar produk ini dikonsumsi di luar misalnya untuk restoran, pabrik pengalengan dan berbagai industri lainnya yang berdaa di wilayah lain. Sektor non basis di sisi lain, terdiri dari usaha-usaha yang secara keseluruhan tergantung dari kondisi usaha local. Misalnya, Usaha warung makan yang menjual makanannya pada konsumen local sehingga produknya sebagian besar dikonsumsi local (Fauzi, 2010).

Analisis *Shift share* digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode itu dipakai untuk

mengamati struktur perekonomian dan pergeseran dengan cara menekankan pertumbuhan sector di daerah, yang dibandingkan dengan sector yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Menurut Stevens dan Moore (1980), Keunggulan dari analisis shift share antara lain: (1). Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi. (2). Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat. (3). Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat.

Location Quotient (LQ) merupakan indeks yang membandingkan sumbangan dalam persen aktivitas tertentu dengan sumbangannya dalam persen beberapa agregasi dasar. Pada tahap awal LQ dapat sangat bermanfaat bagi analisis ekspor dan impor regional. *Location Quotient (LQ)* dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu sector ekonomi termasuk dalam sector basis atau sector non basis di suatu daerah dalam periode tertentu. Sektor basis dikatakan telah mampu berswasembada di wilayahnya dan dapat mengirim atau menyumbang sebagian produksinya ke wilayah lain, sedangkan kebalikannya termasuk dalam sector non basis (Tarigan, 2005).

Pendekatan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi perikanan adalah melalui pendekatan *Minimum Requirement Approach* atau MRA. Meskipun penggunaan MRA biasa digunakan untuk menggambarkan ekonomi wilayah secara keseluruhan, pendekatan ini dapat juga digunakan untuk melihat potret spesifik sector perikanan relative terhadap sector ekonomi lainnya dalam suatu wilayah. Pendekatan ini pertama kali dikenalkan oleh Ullman dan Dacey pada tahun 1960 yang kemudian masih banyak digunakan untuk melihat

keragaman ekonomi sektoral di suatu wilayah sampai saat ini. *Minimum Requirement Approach* mengasumsikan bahwa suatu wilayah tidak akan memenuhi permintaan dari luar sampai kebutuhan wilayahnya dipenuhi terlebih dahulu. *Minimum Requirement Approach* membutuhkan pendugaan variabel yang dianalisis terlebih dahulu (produksi, tenaga kerja, atau yang lainnya) untuk kebutuhan lokal (Fauzi,2010).